

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Permasalahan

Tanggal 18 September 2005 diselenggarakan Pemilu legislatif di Jerman. Dalam Pemilu ini terjadi persaingan ketat antar partai politik untuk dapat meraih mayoritas kursi di *Bundestag*.<sup>1</sup> Setiap 4 tahun sekali Republik Federal Jerman mengadakan Pemilu Legislatif yang diikuti oleh seluruh masyarakat Jerman yang mempunyai hak suara.<sup>2</sup> Selain menentukan anggota *Bundestag*, hasil lain dari Pemilu ini adalah terpilihnya Kanselir Jerman yang akan menjadi kepala pemerintahan di Jerman.

Kanselir federal adalah satu-satunya anggota Pemerintah Federal yang dipilih. Konstitusi memberikan hak kepadanya untuk memilih sendiri para menteri sebagai pimpinan badan-badan pemerintahan. Kanselir menentukan pula jumlah kementerian serta portofolio masing-masing. Kompetensi untuk menentukan garis haluan pemerintahan terletak di tangan Kanselir, yaitu hak Kanselir untuk menetapkan titik berat pekerjaan pemerintah secara mengikat. Dengan adanya kewenangan tersebut, Kanselir federal memiliki perbendaharaan alat kepemimpinan yang dapat dibandingkan dengan kekuasaan presiden di negara demokrasi presidensial. Kanselir bertanggung jawab atas pemerintahan terhadap *Bundestag*. Dan dalam kasus pertahanan nasional, Kanselir adalah komandan supremasi dari angkatan bersenjata Republik Federal Jerman.<sup>3</sup>

Proses dan hasil Pemilu sendiri, salah satunya, ditentukan oleh nilai-nilai yang hidup dalam struktur masyarakat sebuah negara. Begitupun di Jerman. Struktur sosial masyarakat dan negara Jerman sarat akan nilai-nilai patriarki. Hal ini juga terlihat

---

<sup>1</sup> Myrna Ratna, "Jerman Memilih: CDU dan SPD Bersaing Ketat," *Kompas*, 19 September 2005, hlm. 11.

<sup>2</sup> Gunaryadi dan Dessy Nataliani, "Seputar Pemilu Legislatif Jerman 2005", ('s-Gravenhage, 23 September 2005) diperoleh dari <http://indocase.nl> diakses pada 14 September 2009 pukul 11.03 WIB.

<sup>3</sup> Jürgen Hartmann, "Political System: The State, The Legal System and The Citizens" dalam *Facts About Germany*, Frankfurt: Societäts-Verlag, 2007, hlm. 62-64.

pada struktur pemerintahan. Dalam praktek demokrasi di Jerman, sejak tahun 1949 sampai tahun 2005 menjelang Pemilu, jabatan sebagai Kanselir Jerman selalu diisi oleh laki-laki, sebagai berikut:<sup>4</sup> Konrad Adenauer (CDU) dengan masa jabatan 1949-1963; Ludwig Erhard (CDU) dengan masa jabatan 1963-1966; Kurt Georg Kiesinger (CDU) dengan masa jabatan 1966-1969; Willy Brandt (SPD) dengan masa jabatan 1969-1974; Helmut Schmidt (SPD) dengan masa jabatan 1974-1982; Helmut Kohl (CDU) dengan masa jabatan 1982-1998; dan Gerhard Schröder (SPD) dengan masa jabatan 1998-2005.

Namun terdapat hal yang unik pada hasil Pemilu tahun 2005. Angela “Angie” Merkel, dari partai CDU (*Christlich Demokratische Union/Uni Demokrat Kristen*) berhasil menjadi Kanselir Jerman perempuan pertama pada tahun 2005 di usianya yang ke 51 tahun. Merkel juga menjadi orang Jerman timur pertama yang memimpin Negara setelah reunifikasi kedua bagian Jerman diikuti dengan runtuhnya Tembok Berlin.<sup>5</sup> Fenomena seperti ini baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah Republik Federal Jerman.

Jalan meraih kemenangan tersebut pun diraih Merkel dengan penuh perjuangan, mengingat Merkel memiliki identitas yang masih dipandang marginal dalam masyarakat Jerman. Pertama, sebagai perempuan yang bergulat di dunia politik Jerman yang patriarkal. Kedua, sebagai orang yang datang dari Jerman timur-biasa disebut “Ossis”-yang kadang dipandang sebelah mata oleh warga “Wessis” (warga Jerman Barat). Reunifikasi dua Jerman belum mengubah stereotip di kedua komunitas itu.<sup>6</sup> Sesungguhnya, tuntutan persamaan hak telah diterima oleh masyarakat Jerman. Tetapi kebiasaan lama memang sulit dilepaskan sehingga antara hak dan kenyataan sering masih terdapat perbedaan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

<sup>5</sup> Frederick Florin, “Angela Merkel,” diperoleh dari [http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/people/m/angela\\_merkel/index.html](http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/people/m/angela_merkel/index.html) diakses pada 6 September 2009 pukul 11:00 WIB.

<sup>6</sup> Myrna Ratna, “Sosok Angela Merkel, Sang Kanselir,” *Kompas*, 11 Oktober 2005, hlm. 16.

<sup>7</sup> Joachim Peters, “Pembagian Wilayah Jerman dan Berlin: Tembok yang Membelah Bangsa” dalam *Sebuah Negara dan Penduduknya: Republik Federal Jerman Memperkenalkan Dirinya*, Sulzbach: Altes Schulhaus, 1985, hlm. 13.

Permasalahan identitas ini terbentuk atas permasalahan ideologi dan peninggalan sejarah negara Jerman sendiri. Akan tetapi uniknya, Angela Merkel justru berhasil terpilih menjadi Kanselir Jerman pada tahun 2005 tersebut. Sehingga proses kemenangan ini, mencakup faktor-faktor pendukung kemenangan di dalamnya, menjadi menarik untuk diteliti. Bagaimana seorang Angela Merkel dapat terpilih menjadi Kanselir Jerman pertama yang memiliki status sosial yang masih dipandang marjinal dalam masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Ada beberapa masalah yang dihadapi Angela Merkel dalam usahanya meraih kekuasaan tertinggi di Jerman. Identitas sosialnya yang tergolong dipandang "kurang" dalam masyarakat cukup memberatkan dan dapat menghambat usaha-usaha politiknya. Permasalahan identitas tersebut adalah:

### **1.2.1 Budaya Patriarkal dalam Masyarakat Jerman**

Gambaran umum arena permainan politik di setiap negara menunjukkan adanya kondisi tidak kondusif terhadap partisipasi perempuan, dimana perempuan yang ingin masuk ke dalam dunia politik menemukan kenyataan bahwa lingkungan politik, publik, budaya dan sosial sering tidak bersahabat atau bahkan bermusuhan dengan kaumnya. Maka perempuan di seluruh dunia merasa dirinya kurang terwakili dalam parlemen dan jauh dari keterlibatan dalam pembuatan keputusan.<sup>8</sup> Kondisi seperti ini dapat dilihat melalui budaya dan etos politik formal sangat diwarnai oleh gaya hidup laki-laki yang memiliki karakter agresif serta kompetitif. Politik maskulin ini dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, terdapat di dalam masyarakat tradisional dimana politik dilihat sebagai hubungan patron-klien yang mengambil bentuk dari struktur bapak-anak-keluarga. Yang kedua, politik maskulin adalah hal yang mengakar pada rasa persaudaraan (fraternalisme).<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Nadezdha Shvedova, *Kendala-Kendala terhadap Partisipasi Perempuan dalam Parlemen dalam Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah Bukan Sekedar Hiasan*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 1999), hlm. 17.

<sup>9</sup> Gadis Arivia, "Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah Bukan Sekedar Hiasan" dalam Azza Karam, *Aspirasi Perempuan Anggota Parlemen Terhadap Pemberdayaan Politik Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 1999), hlm. 3.

Pemahaman masalah fraternalisme ini penting untuk bisa mengerti akan fenomena eksklusifitas perempuan di dalam dunia politik. Sudah sejak awalnya, arena politik adalah arena yang dimaksudkan untuk “anggota” laki-laki. Atas dasar itu, tidak mengherankan dan menjadi sesuatu yang “wajar” jika arena politik didominasi oleh laki-laki. Laki-laki mendominasi arena politik; laki-laki memformulasikan aturan permainan politik; dan laki-laki pula yang mendefinisikan standar untuk evaluasi.<sup>10</sup>

Masalah ini juga terlihat dalam perjalanan Merkel, terkait akan hak dan posisi perempuannya, dalam politik Negara Jerman yang patriarkal. Dalam masyarakat Jerman, selama berabad-abad, peran wanita diringkaskan dan dibatasi oleh tiga "K" kata-kata: *Kinder* (anak-anak), *Kirche* (gereja), dan *Kuche* (dapur). Sepanjang abad kedua puluh, bagaimanapun, perempuan telah secara bertahap berupaya untuk memperoleh persamaan hak. Pada tahun 1919, perempuan menerima hak untuk memilih. Perubahan yang sangat besar kemudian terjadi akibat Perang Dunia II. Selama perang, posisi perempuan kembali diasumsikan secara tradisional dipegang oleh laki-laki. Setelah perang, terdapat kelompok yang disebut *Trümmerfrauen* (perempuan dari puing-puing), yaitu perempuan-perempuan yang cenderung terluka, menguburkan orang mati, menyelamatkan barang-barang, dan memulai tugas berat membangun kembali Jerman -yang telah dilanda perang- dengan hanya menyingkirkan puing-puing.<sup>11</sup>

Pada masyarakat Jerman modern pun masih terdapat hambatan besar untuk kesetaraan jenis kelamin di lingkungan kerja sebagai akibat dari struktur keluarga patriarkal yang terus-menerus dilakukan. Terdapat ketimpangan pendapatan: upah dan gaji seorang wanita hanya berkisar antara 65 persen dan 78 persen dari gaji atau upah yang diterima laki-laki untuk berbagai posisi.<sup>12</sup> Perempuan juga sering

<sup>10</sup> Shvedova, *Op. Cit.*, hlm. 20.

<sup>11</sup> Jone Johnson Lewis, “Status Perempuan,” (Jerman A Country Study, Federal Research Division, 1995) diperoleh dari [http://womenshistory.about.com/library/ency/blwh\\_germany\\_women.htm](http://womenshistory.about.com/library/ency/blwh_germany_women.htm), diakses pada 8 September 2008 pukul 19.48 WIB.

<sup>12</sup> *Ibid.*

ditempatkan pada posisi lebih rendah yang pembayarannya kurang baik.<sup>13</sup> Dan biarpun perempuan kini lebih sering menduduki posisi pimpinan daripada di masa lalu, halangan yang mereka hadapi dalam meniti karier juga masih cukup besar.<sup>14</sup> Dalam kebanyakan bidang pun, perempuan tidak memegang posisi kunci. Umumnya, semakin tinggi posisi, semakin kuat dominasi laki-laki.<sup>15</sup> Terlebih lagi Jerman merupakan negara Eropa yang termasuk negara yang banyak memiliki kasus pelanggaran terhadap hak perempuan. Jerman merupakan negara Eropa lainnya yang banyak memiliki kasus pelanggaran terhadap hak perempuan. Hal itu bisa dilihat dari hasil penelitian Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan Tahun 2004. Media-media massa Jerman sering kali melihat perempuan sebagai sekedar komoditas seks. Angka pengangguran di kalangan perempuan juga meningkat. Selain itu, perempuan juga memperoleh standar gaji yang lebih rendah dan dipekerjakan pada level yang rendah. Laporan komite PBB mengungkapkan kekhawatiran atas maraknya kasus pemanfaatan perempuan sebagai komoditas seks di Jerman.<sup>16</sup>

### 1.2.2 Kesenjangan antara Masyarakat Jerman Barat dan Jerman Timur

Masalah identitas kedua berkaitan dengan kesenjangan sosial, ekonomi maupun politik antara masyarakat (bekas) penduduk Jerman Timur dan Jerman Barat. Kesenjangan ini adalah peninggalan dari sejarah pembentukan Negara Jerman itu sendiri. Berdasarkan Perjanjian Potsdam, sebagai hasil dari Perang Dunia II, Jerman dibagi dalam empat zona kekuasaan. Amerika Serikat, Inggris dan Perancis menguasai tiga zona, yang disebut zona Barat (dengan nilai-nilai demokratik)<sup>17</sup> dan Uni Soviet menguasai zona Timur (dengan nilai-nilai sosialis-kolektivisme yang dibangun dengan cara yang represif dan menimbulkan ketakutan-ketakutan pada

<sup>13</sup> Rainer Geissler, "German Society: modern, pluralist and open-minded" dalam *Facts About Germany*, (Frankfurt: Societäts-Verlag, 2007), hlm. 144.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Lewis, *Loc. Cit.*

<sup>16</sup> Vombunomb. "Pelanggaran Hak Perempuan di Barat," (Indonesian Radio, 15 April 2009), diperoleh dari [http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com\\_content&task=view&id=10442&Itemid=28](http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=10442&Itemid=28) diakses pada 8 September 2009 pukul 13.08 WIB.

<sup>17</sup> Birgit Becker, "60 Tahun Konstitusi Jerman: Jalan Panjang Menuju Kemapanan," diperoleh dari [http://id.qantara.de/webcom/show\\_article.php/c-768/nr-2/i.html](http://id.qantara.de/webcom/show_article.php/c-768/nr-2/i.html) diakses pada 8 September 2009 pukul 13.12 WIB.

warga negaranya).<sup>18</sup> Di sinilah awal mula terciptanya kesenjangan ideologi serta paham politik yang tajam antara kedua bagian Jerman. Perbedaan ideologi yang hidup di Jerman Barat dan Timur semakin terasa dengan ditandai oleh Tembok Berlin sepanjang 165 km (45 km ke Berlin Barat dan 120 km Brandenburg) dan tinggi 3,6 m, terletak di ibukota Jerman, di kota Berlin. Dibangun pada 13 Agustus 1961,<sup>19</sup> tembok ini membelah Berlin menjadi dua, bagian timur dikendalikan oleh pemerintahan sosialis Soviet dan di bagian barat diawasi oleh tiga negara demokratik, yaitu Amerika Serikat (AS), Inggris dan Prancis.<sup>20</sup>

Selain masalah perbedaan paham politik dan ideologi, faktor ekonomi juga mengakibatkan kesenjangan antara kedua bagian Jerman. Kejayaan ekonomi (*Wirtschaftswunder*) yang dialami Jerman Barat, di bawah koordinasi dan konsolidasi oleh kubu blok Barat, menjadi magnet yang kuat menarik orang-orang Jerman Timur untuk bermigrasi ke Jerman Barat, demi sebuah kepastian untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik dan standar hidup yang lebih tinggi.<sup>21</sup> Dalam 12 tahun sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, antara 2,5 juta hingga 3 juta warga Berlin Timur melakukan eksodus ke Berlin Barat demi mencari penghidupan yang lebih baik. Sedangkan di tengah masa pembangunan Tembok itu, sebanyak 1.000 warga di Berlin Timur setiap hari mengungsi ke Barat.<sup>22</sup> Kelompok yang melakukan migrasi kebanyakan adalah orang-orang muda, berkeahlian dan produktif. Hal ini tentu saja malah membawa hambatan bagi pertumbuhan ekonomi Jerman Timur sendiri.<sup>23</sup> Itulah sebabnya pemerintah komunis Jerman Timur, dengan restu Soviet, tidak hanya

---

<sup>18</sup> Nunung Mintarsih, *Penentangan Terhadap Sistem Sosial Politik di Jerman Timur dalam Roman Flugasche Karya Monika Maron*, (Disertasi Doktor Ilmu Susastra Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 1998), hlm. 45.

<sup>19</sup> Tixik, "Tembok Berlin," diperoleh dari <http://id.tixik.com/berlin-wall-2357478.htm> diakses pada 8 September 2009 pukul 12.52 WIB.

<sup>20</sup> Renne R.A Kawilarang, "Pembangunan Tembok Berlin: Pembangunan Tembok Berlin itu menegaskan Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet," diperoleh dari [http://dunia.vivanews.com/news/read/82528-pembangunan\\_tembok\\_berlin](http://dunia.vivanews.com/news/read/82528-pembangunan_tembok_berlin) diakses pada 8 September 2009 pukul 12.49 WIB.

<sup>21</sup> Michael G. Roskin, *The Rebirth of East Europe*, (New Jersey: Prentice Hall, 1994), hlm. 116.

<sup>22</sup> Kawilarang, *Loc. Cit.*

<sup>23</sup> Roskin, *Op. Cit.*

membangun tembok, namun juga menerapkan penjagaan bersenjata untuk mencegah eksodus tersebut.<sup>24</sup>

Pada tanggal 9 November 1989, seiring dengan pudarnya dominasi Soviet, rakyat di Jerman Timur memutuskan untuk merubuhkan Tembok Berlin. Perubahan itu akhirnya mengarahkan kepada penyatuan kembali Jerman pada 3 Oktober 1990.<sup>25</sup> Namun Sampai saat menjelang Pemilu pun timbul masalah kronis dalam hal transfer pendapatan antar wilayah. Pendapatan penduduk bekas Jerman Barat yang selama ini dipotong untuk pembangunan wilayah bekas Jerman Timur, kini mulai frustrasi karena dianggap tidak ada perkembangan berarti di bekas Jerman Timur. Tingkat kompetisi dan daya saing warga bekas Jerman Timur dinilai tetap rendah, memicu ketidakefisienan perekonomian Jerman.<sup>26</sup> Terkait dengan permasalahan yang telah diungkapkan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji pertanyaan:

**Bagaimanakah Permasalahan Identifikasi Identitas yang terjadi dalam pemilihan Kanselir Jerman tahun 2005? Apa faktor-faktor yang menyebabkan kemenangan Angela Merkel sebagai Kanselir Jerman pada pemilihan tahun 2005 tersebut?**

### **1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah permasalahan identitas sosial dalam masyarakat yang terjadi dan berperan dalam proses pemilihan Kanselir Jerman tahun 2005. Selain itu, penulis ingin mengetahui apa saja faktor-faktor kemenangan yang juga berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan Angela Merkel terpilih sebagai Kanselir Jerman pada pemilihan tersebut.

Signifikansi penelitian ini, secara teoritik, adalah memberikan kontribusi pemikiran akan teori perilaku pemilih dan partai politik, khususnya di negara Jerman pada masa pemilihan Kanselir tahun 2005. Sedangkan secara praktek, penelitian ini

---

<sup>24</sup> Kawilarang, *Loc. Cit.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Ahmad Erani Yustika, "Schröder, Merkel dan Negara Kesejahteraan," *Kompas*, 20 September 2005, hlm. 6.

juga dapat memberikan masukan bagi pelaksanaan Pemilihan Umum di Jerman, sekaligus dapat menjadi contoh bagi pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia sendiri.

## 1.4 Kerangka Teori

### 1.4.1 Teori Patriarki

Patriarki adalah ideologi yang menjadikan nilai-nilai laki-laki sebagai norma, berdasarkan pada pengertian “Patriarki” yaitu penguasaan terhadap perempuan dan alam.<sup>27</sup> Teori politik Patriarkal memiliki banyak kesamaan dengan tradisi patriarkalisme, yang menjadikan model keluarga sebagai model umum dalam keteraturan sosial dan menunjukkan bahwa masyarakat politik muncul dari keluarga. Teori Patriarkal adalah formulasi eksplisit yang dijadikan justifikasi untuk kekuasaan dan kepatuhan politik. Interpretasi umum dari teori Patriarkal bersumber dari aturan-aturan Paternalisme, yang didasarkan pada doktrin hak politik seorang Bapak dan doktrin kebebasan alami anak laki-laki. Para Patriarkis mengklaim bahwa Bapak dan raja memerintah dengan cara yang persis sama; bahwa keluarga dan pemerintahan adalah sama; bahwa anak laki-laki terlahir secara alami untuk mengikuti Bapaknya; dan bahwa kekuasaan dan kepatuhan politik serta hirarki ketidaksetaraan adalah bersifat alamiah.<sup>28</sup> Dengan kata lain, Patriarki adalah "pemerintahan oleh Bapak". Bapak memiliki otoritas alami atas keluarga, dan raja, sama dengan Bapak, memiliki otoritas mutlak atas rakyatnya.

Kemudian filsafat liberal pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas mengganti pengertian 'otoritas alami' dari para leluhur patriarki dengan model kebebasan, kesetaraan dan rasional individual. Namun, terdapat beberapa

---

<sup>27</sup> John Zerzan, “Patriarki, Peradaban, dan Asal Usul Gender,” diperoleh dari <http://anarchoi.gudbug.com/2007/10/15/patriarki-peradaban-dan-asal-usul-gender/> diakses pada 8 September 2009 pukul 18.45 WIB.

<sup>28</sup> Carole Pateman, *Democracy, Feminism, and Political Theory*, (U.S.A: Stanford University Press, 1989), hlm. 36.

ambivalensi<sup>29</sup> tentang penempatan posisi perempuan dalam filsafat egaliter yang baru. Pada era 1970-an, feminis radikal, seperti Millet (1971), mulai menggunakan istilah ‘Patriarki’ dalam hal yang lebih umum. ‘Patriarki’ mengacu pada kekuasaan laki-laki atas perempuan, daripada sekedar pemerintahan oleh bapak. Dalam teori feminis radikal, patriarki tidak lagi terbatas untuk menganalisis hubungan kekuasaan di dalam keluarga atau di tingkat inter-personal tetapi juga mulai diterapkan pada hubungan antara laki-laki dan perempuan di semua lembaga-lembaga masyarakat.<sup>30</sup> Patriarki adalah satu aspek ketidaksetaraan gender dimana perempuan dilihat bersifat subordinat.<sup>31</sup>

#### 1.4.2 Teori Tentang Partai Politik

Jika dikaitkan dengan perempuan, maka partai politik adalah suatu wadah bagi perempuan untuk ikut berbagi kekuasaan, berbagi program dengan laki-laki agar terciptanya kebijakan yang egaliter. Salah satu tugas partai politik adalah menampung semua pendapat dan keinginan rakyat banyak kemudian langkah selanjutnya adalah memilihnya dan merumuskannya serta menyerahkannya kepada pemerintah untuk dapat dijadikan program politik agar diperjuangkan semaksimal mungkin.<sup>32</sup> Di sini berarti bahwa partai politik bertugas dan bertanggung jawab penuh pada kepentingan masyarakat terutama kepentingan perempuan sebagai suara pemilih terbanyak.

Selanjutnya di dalam dunia politik, perjuangan kepentingan perempuan dipengaruhi oleh perumusan kepentingan (*interest*) perempuan yang secara konseptual akan mempengaruhi praktisnya/aksi di lapangan. Konsep kepentingan tersebut dikenal dengan kepentingan politik gender (*political interest of gender*). Dalam perdebatan tentang perbedaan kepentingan perempuan dengan kepentingan

<sup>29</sup> Ambivalensi: Perasaan yang bertentangan dan tidak disadari terhadap sesuatu situasi yang sama, dalam Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, 1997, hlm. 33.

<sup>30</sup> Jean Gardiner, *Gender, Care and Economics*, London: Macmillan Press Ltd., 1997, hlm. 102.

<sup>31</sup> Walby, *Theorizing Patriarchy*, Oxford UK and Cambridge USA: Blackwell Publishers, 1990, hlm. 2.

<sup>32</sup> Sulistyati I. Gani dalam Sri Budiyati Wuryaningsih, *Makna Politik Bagi Perempuan, Sebuah Dialektika (Studi tentang Pemaknaan Politik Bagi Aktivitas Perempuan di Partai Politik)*, Skripsi Sarjana Jurusan Sosiologi, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 1999), hlm.16.

politik kebanyakan, Diamond dan Hartsock, maupun Sapiro mengatakan bahwa selama ini rumusan kebijakan publik dan kekuasaan negara belum memperluas pendefinisian kepentingan (*interest*) publik. Di situ belum dimasukkan pembagian masyarakat menurut kegiatan reproduksinya.<sup>33</sup>

Salah satu sistem kepartaian, yang dikemukakan oleh Maurice Duverger, dalam suatu pemerintahan adalah sistem dua partai. Sistem dua partai bersaing merupakan suatu sistem kepartaian yang di dalamnya terdapat dua partai yang bersaing untuk mendapatkan dan mempertahankan kewenangan memerintah melalui Pemilihan Umum.<sup>34</sup> Sistem dwi-partai ini dapat berjalan baik apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu komposisi masyarakat bersifat homogen, adanya konsensus kuat dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial dan politik, dan adanya kontinuitas sejarah.<sup>35</sup>

Identifikasi partai politik merupakan karakteristik stabil yang ditemukan dalam suatu penyelenggaraan Pemilu. Pemilih menggunakan identifikasi partai ini sebagai pertimbangan untuk menjadi partisan partai politik tertentu. Konsep mengenai partisan dapat menjelaskan kondisi seorang pemilih yang bersikap loyal terhadap satu partai politik tertentu, meskipun kadang tidak mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Partisan ini dapat mengekspresikan kekecewaan terhadap partainya melalui perilaku memilih (suara). Namun sistem dwi-partai membatasi jalan untuk itu.<sup>36</sup>

### 1.4.3 Teori Tingkah Laku Politik Pemilih

Studi tentang tingkah laku politik (*political behaviour*) terutama tingkah laku pemilih dalam kaitannya dengan pemilihan umum bersumber dari dua mazhab, yaitu

<sup>33</sup> Rebeka dalam Wuryaningsih, *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>34</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999), hlm. 126.

<sup>35</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 417.

<sup>36</sup> Nichole Bauer, "Sticking With It: How Loyalty Explains Political Party Identification" dalam *Y673 Mini Conference Paper* (Spring 2010), p. 1-2, diperoleh dari [http://www.indiana.edu/~workshop/publications/materials/conference\\_papers/Y673\\_Bauer.pdf](http://www.indiana.edu/~workshop/publications/materials/conference_papers/Y673_Bauer.pdf) diakses pada 11 Juli 2010 pukul 23.00 WIB.

*Mahzab Colombia*, yang dikembangkan oleh *The Columbia School of Electoral Behavior*, atau dikenal dengan model/pendekatan sosiologis, dan *Mahzab Michigan*, yang diajukan oleh *The Michigan Survey Research Center*, atau dikenal sebagai model/pendekatan sosio-psikologis, dapat dilihat sebagai berikut:<sup>37</sup>

*Mahzab Colombia* memandang masyarakat sebagai suatu yang bersifat hierarkis, terutama didasarkan atas status, karena masyarakat secara keseluruhan merupakan kelompok orang yang mempunyai kesadaran status yang sangat kuat. Pendukung mahzab ini percaya bahwa masyarakat sudah tertata sedemikian rupa sesuai dengan latar belakang pekerjaan dan penghasilannya. Individu diurutkan ke dalam suatu tingkatan sesuai dengan latar belakang sosialnya. Dipahami bahwa suatu tingkat tertentu merupakan faktor yang sangat vital di dalam memahami perilaku politik individu. Dengan demikian mahzab ini lebih menekankan pada peranan faktor sosiologis di dalam membentuk perilaku politik seseorang.

Mahzab kedua adalah *Mahzab Michigan*, berlaku terutama di Amerika. Menurut pendukung mahzab ini masyarakat pemilih menentukan pilihan karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari proses pengembangan dirinya sendiri (sosialisasi). Melalui proses sosialisasi kemudian berkembanglah ikatan psikologis yang kuat antara seorang individu dengan salah satu organisasi massa atau organisasi politik yang berwujud simpati terhadap partai politik. Ikatan psikologis inilah yang dikenal sebagai identifikasi kepartaian.

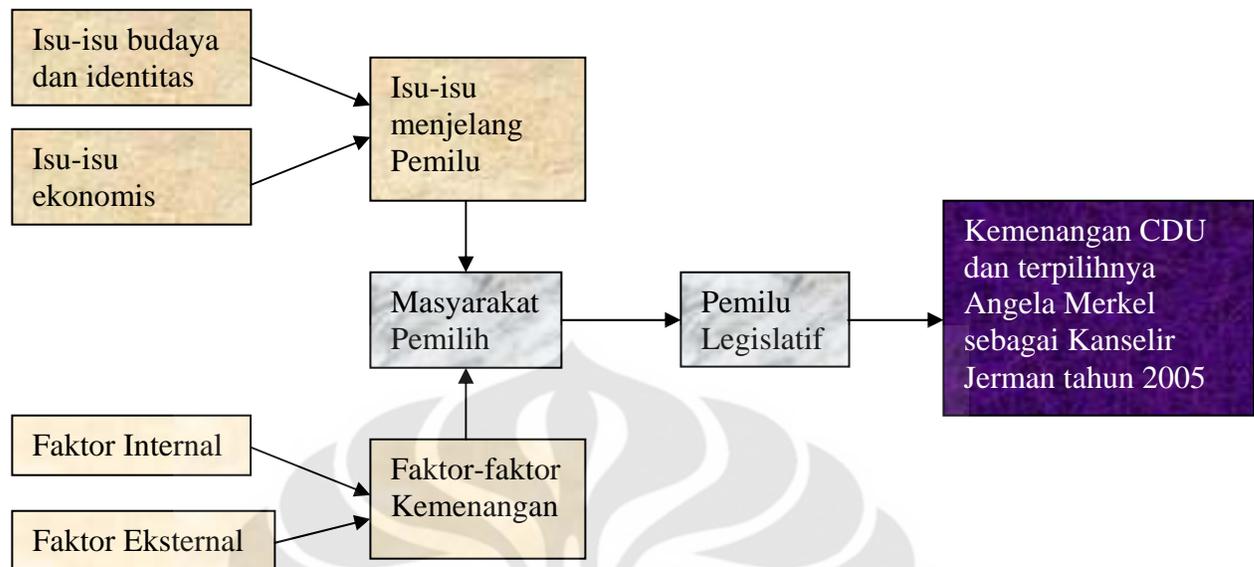
Selain itu, terdapat pula pendekatan lain di luar pendekatan di atas yaitu pendekatan pilihan rasional. Pendekatan ini berkaitan dengan dua orientasi utama. Yang pertama adalah orientasi kandidat, yaitu orientasi yang mengacu pada sikap seseorang terhadap kandidat tanpa memperhatikan partai politiknya. Dan yang kedua adalah orientasi isu, yaitu orientasi yang mengacu pada tema atau isu-isu yang diangkat oleh sebuah partai politik.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Affan Gaffar dalam Djoko Susilo, *Laporan Penelitian: Tingkah Laku Politik Masa Pinggiran Dalam Pemilu 1992*, Disertasi Doktor, (Jember: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Universitas Jember Pusat Penelitian Tahun 1992, 1992), hlm. 17-18.

<sup>38</sup> Adman Nusrul, *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 64.

### 1.5 Skema Alur Berpikir



Mengacu pada bagan di atas, kita dapat melihat bahwa masyarakat pemilih, dalam menentukan pilihan politiknya pada Pemilu Legislatif 18 September 2005, dipengaruhi oleh isu-isu yang beredar dalam lingkungannya, menjelang Pemilu. Isu-isu yang berkaitan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua. Isu yang pertama adalah isu yang berkaitan dengan budaya dan identitas kandidat maupun partai politik. Isu ini berkaitan dengan identifikasi terhadap seorang kandidat atau partai yang telah terbangun melalui proses sosialisasi dalam masyarakat.

Isu yang diberatkan kepada Angela Merkel sebagai seorang kandidat adalah berkaitan dengan identitas sosialnya sebagai perempuan dan orang Jerman Timur yang masih dipandang marjinal dalam masyarakat Jerman. Sementara kandidat *incumbent* Gerhard Schröder memiliki identitas sosial yang lebih diunggulkan dan sekaligus menguntungkan bagi figur dirinya dalam masyarakat. Schröder adalah laki-laki dan seorang Jerman Barat. Masalah diskriminasi terhadap perempuan yang tetap terjadi di dalam Jerman yang telah bersatu, akibat dari nilai-nilai Patriarki yang telah tertanam kuat dalam masyarakat Jerman. Meskipun menurut UUD Republik Federal Jerman, yang dirumuskan pada tahun 1949, pria dan wanita memiliki hak yang sama.

Namun apa yang tercantum dalam UUD belum tentu terwujud dengan sendirinya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>39</sup> Pada masyarakat Jerman modern, masih terdapat hambatan besar untuk kesetaraan jenis kelamin di lingkungan kerja sebagai akibat dari struktur keluarga patriarkal yang terus-menerus dilakukan.<sup>40</sup>

Begitupun dengan kesenjangan antara status sosial yang ada. Status sosial masyarakat Jerman Barat dan Jerman Timur telah terbedakan dengan tajam dan menjadi diskriminatif. Hal ini tidak lepas dari masalah kesenjangan kelas sosial politik antara masyarakat Jerman Barat dan Timur. Pemisahan tajam semakin terasa saat dilakukan pembangunan Tembok Berlin, yang merupakan simbol dimulainya Perang Dingin antara blok negara Barat (dengan nilai-nilai demokratis) dan blok negara Timur (dengan nilai-nilai sosialis). Tembok ini telah menjadi penanda perbedaan ideologi politik yang saling memerangi satu sama lain, sekaligus penghambat komunikasi warga Berlin yang tadinya leluasa bepergian dari Barat ke Timur dan sebaliknya, dan yang lebih buruk adalah menghalangi warga Berlin Barat dan Timur untuk saling bersinergi.<sup>41</sup> Pemecahan identitas Barat dan Timur ini juga mempengaruhi pembentukan identifikasi partai politik di Jerman. Identitas dua partai politik utama Jerman terbagi berdasarkan dikotomi Barat dan Timur. CDU-CSU dikenal sebagai partai dengan budaya Kristen Demokrat dan nilai-nilai Neo-liberal di Jerman bagian Barat, sementara SPD dilihat sebagai partai Kiri dengan nilai-nilai serta budaya Sosialis Demokrat di Jerman bagian Timur.

Isu yang kedua berkenaan dengan hal-hal yang bersifat lebih ekonomis, dimana isu ini berkembang sejalan dengan kebutuhan kehidupan ekonomi masyarakat dalam negara. Selain perbedaan politis, faktor ekonomi juga mengakibatkan kesenjangan antara kedua bagian Jerman. Kondisi perekonomian Jerman Barat yang lebih unggul mengakibatkan eksodus besar-besaran oleh warga Berlin Timur ke

<sup>39</sup> Joachim Peters, "Wanita dalam masyarakat: Hak yang sama untuk Semua" dalam *Sebuah Negara dan Penduduknya: Republik Federal Jerman Memperkenalkan Dirinya*, (Sulzbach: Altes Schulhaus, 1985), hlm. 73.

<sup>40</sup> Vombunomb, "Pelanggaran Hak Perempuan di Barat," (Indonesian Radio, 15 April 2009), diperoleh dari [http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com\\_content&task=view&id=10442&Itemid=28](http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=10442&Itemid=28) diakses pada 8 September 2009 pukul 13.08 WIB.

<sup>41</sup> Handito Hadi Joewono, "Bedah Kasus Tembok Berlin," (24/04/2005) diperoleh dari [http://www.kbizz.net/id/tembok\\_berlin.pdf](http://www.kbizz.net/id/tembok_berlin.pdf) diakses pada 8 September 2009 pukul 12:23 WIB.

Berlin Barat demi mencari penghidupan yang lebih baik.<sup>42</sup> Tidak lebih sedikit dari lima juta orang Jerman Timur bermigrasi ke Jerman Barat setiap tahunnya. Hal ini tentu saja malah membawa hambatan bagi pertumbuhan ekonomi Jerman Timur sendiri.<sup>43</sup> Sampai saat menjelang Pemilu pun masih timbul masalah kronis dalam hal transfer pendapatan antar wilayah.<sup>44</sup> Untuk membedakan partai politik pun, dapat berlandaskan kepada stratifikasi kelas ekonomi yang ada dalam masyarakat. CDU-Merkel sendiri adalah pendukung kelas pebisnis sementara SPD-Schröder adalah pelindung kelas pekerja.

Selain permasalahan budaya dan identitas, ada pula faktor-faktor, di luar isu-isu yang beredar, yang menjadi pendukung terciptanya kemenangan CDU-Merkel pada Pemilu tahun 2005. Faktor-faktor kemenangan ini kemudian dapat dilihat menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat berasal dari dalam diri kandidat, misalnya kualitas personalnya. Sedangkan faktor eksternal dapat berasal dari lingkungan persaingan partai politik, misalnya dalam persaingan strategi kampanye, perubahan peta kekuatan politik dan perubahan perilaku pemilih dalam negara. Faktor-faktor kemenangan ini dapat menjelaskan keberhasilan yang dicapai Merkel, mencakup pula bagaimana posisi "masalah identitas" kandidat maupun partai politik yang ada dan terjadi menjelang Pemilu 2005 di Jerman.

## 1.6 Asumsi

Perempuan dan orang (bekas) Jerman Timur telah berada dalam posisi yang relatif marginal selama berpuluh-puluh tahun di tengah masyarakat Jerman, terutama dalam arena politik. Hal inilah yang menyebabkan jabatan Kanselir, sebagai posisi nomor satu di dalam Negara Jerman, selalu diisi oleh laki-laki dan oleh orang (bekas) Jerman Barat sepanjang sejarah negara demokratis Jerman sendiri. Kecendrungan ini

---

<sup>42</sup>Renne R.A Kawilarang, "Pembangunan Tembok Berlin: Pembangunan Tembok Berlin itu menegaskan Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet," diperoleh dari [http://dunia.vivanews.com/news/read/82528-pembangunan\\_tembok\\_berlin](http://dunia.vivanews.com/news/read/82528-pembangunan_tembok_berlin) diakses pada 8 September 2009 pukul 12.49 WIB.

<sup>43</sup>Michael G. Roskin, *The Rebirth of East Europe*, (New Jersey: Prentice Hall, 1994), hlm. 116.

<sup>44</sup>Ahmad Erani Yustika, "Schröder, Merkel dan Negara Kesejahteraan," *Kompas*, 20 September 2005, hlm. 6.

kemudian dibebankan dan merupakan hambatan besar bagi Angela Merkel untuk dapat terpilih menjadi Kanselir Jerman pada Pemilu tahun 2005. Merkel berada di dalam struktur masyarakat Jerman dengan budaya Patriarkhi yang kuat, dimana ideologi ini menjadikan nilai-nilai laki-laki sebagai norma dalam negara.

Merkel juga berada di tengah kesenjangan kelas sosial yang curam antara masyarakat Jerman Barat dan Jerman Timur. Seperti yang dikemukakan Max Weber, terdapat beberapa dimensi-dimensi stratifikasi sosial yakni dimensi ekonomis, sosial dan politis. Weber berpendapat bahwa di dalam setiap tertib, warga-warga masyarakat terbagi dalam kelas-kelas (ekonomis), kelompok status (sosial), dan partai-partai (politis). Maka kesenjangan kelas antara barat dan timur ini juga berpengaruh pada keputusan politik masyarakat Jerman. Struktur sosial masyarakat yang telah terbentuk dengan kesenjangan yang ada menghasilkan suatu rasionalitas formal yang diterapkan secara universal. Sehingga terdapat nilai-nilai yang mempengaruhi masyarakat untuk menentukan pilihannya. Nilai-nilai, seperti nilai sosial dan budaya, tersebut telah tertanam kuat dalam diri setiap orang Jerman, yang mempengaruhi mereka dalam berperilaku, bertindak dan berinteraksi dalam masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi dan juga politik, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya pada Pemilu 18 September 2005.

Merkel harus berhadapan dengan kandidat *incumbent* yang cukup tangguh dari SPD (*Sozialdemokratische Partei Deutschland*), Gerhard Schröder. Schröder jelas lebih unggul dari Merkel, terutama mengingat bahwa Schröder jelas tidak terbebani oleh masalah "identitas marjinal" selayaknya Merkel. Schröder adalah laki-laki dan berasal dari Mossenberg, Lower-Saxony, Jerman barat. SPD sendiri memiliki kekuatan yang cukup besar untuk bersaing dengan CDU.

Akan tetapi, Merkel berhasil terpilih sebagai Kanselir Jerman pada tahun 2005. Hal ini memperlihatkan bahwa ada faktor-faktor yang lebih determinan, bagi para pemilih, dibandingkan dengan keberadaan "identitas yang marjinal" di tengah masyarakat dalam proses Pemilihan Umum serta pemilihan Kanselir Jerman tahun 2005. Terlepas dari identitas sosial yang menempel pada dirinya, ada faktor-faktor lain yang berpengaruh dan berkontribusi dalam kemenangan Angela Merkel.

Contohnya, Merkel adalah kandidat yang berasal dari CDU, partai yang telah memiliki kekuatan besar dalam masyarakat Jerman. *Christlich Demokratische Union Deutschlands*, atau yang juga dikenal sebagai *Christian Democratic Union (CDU)*, merupakan salah satu partai besar di Jerman yang telah didirikan sejak bulan Juni tahun 1945. CDU juga terbilang sebagai salah satu partai yang paling berhasil setelah Perang Dunia II di Jerman Barat, terutama dalam hal sumbangan mereka melahirkan dan memupuk tradisi “Demokrasi Bonn” sejak 1949. Sejak lahirnya Republik Federal Jerman 1949 hingga 1969, pucuk pemerintahan selalu dipegang oleh partai CDU/CSU tanpa selingan.<sup>45</sup> Hal ini dapat menjadi salah satu faktor kekuatan bagi Merkel dalam menghadapi Pemilu, mengingat bahwa pada Pemilu 18 September 2005 sesungguhnya warga Jerman tidak memilih tokoh, melainkan partai, dan menjelang Pemilu memang SPD kalah populer dibandingkan dengan CDU.<sup>46</sup>

### 1.7 Metode Penelitian

Dalam menyusun metode penelitian dalam skripsi ini, peneliti mengacu pada buku Earl Babbie, *The Practice of Social Research*, dengan karakteristik sebagai berikut:<sup>47</sup>

Skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian eksplanatori, yaitu berujuan untuk menjelaskan sesuatu. Jika penelitian deskriptif menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa, dimana, kapan dan bagaimana, maka penelitian ini akan menambahkan penjelasan sebagai jawaban atas pertanyaan ”mengapa?”. Selain akan memaparkan *bagaimana* masalah identitas kandidat maupun partai yang terjadi dalam proses pemilihan Kanselir Jerman pada tahun 2005, skripsi ini juga akan menjelaskan *mengapa* Merkel dapat terpilih sebagai Kanselir, padahal ia berada dalam posisi dan kondisi yang sulit untuknya di tengah masyarakat Jerman, dimana ia dibebankan oleh

<sup>45</sup> B. N. Marbun, *Demokrasi Jerman: Perkembangan dan Masalahnya*, (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1983), hlm. 208.

<sup>46</sup> Associated Press, Agence France Presse, Reuters, dan MYR “Pemilu Jerman: Partai Angela Merkel Terus Memimpin,” Kompas, 30 Agustus 2005, hlm. 8.

<sup>47</sup> Earl Babbie, *The Practice of Social Research*, (Belmont: Wadsworth/Thomson Learning, 2004), hlm. 25-199.

”masalah identitas sosial yang marjinal dalam masyarakat” menjelang Pemilu tahun 2005.

Untuk itu, skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu berangkat dari hal yang bersifat khusus ke hal yang lebih umum. Berangkat dari studi kasus yang khusus, terpilihnya Angela Merkel sebagai Kanselir Jerman tahun 2005, untuk perumusan hal yang lebih umum, yaitu tingkah laku pemilih dalam masyarakat Jerman modern. Model logika akan dikembangkan dari kegiatan observasi yang spesifik, untuk merumuskan teori-teori yang lebih bersifat umum pada akhirnya. Selain itu penelitian ini juga menggunakan data-data kualitatif yaitu data-data yang bersifat non-numerik. Penulis akan berusaha untuk menghimpun data-data tersebut dari berbagai sumber kepustakaan dan juga wawancara, dengan Teknik Pengumpulan Data sebagai berikut:

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan cetak maupun elektronik mengenai permasalahan akan dikumpulkan terlebih dahulu untuk memberi gambaran dan informasi dasar yang objektif mengenai proses dan hasil pencapaian Angela Merkel menjadi Kanselir Jerman pada tahun 2005. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam mengumpulkan data sekunder adalah meminta data ke instansi yang terkait permasalahan, studi literatur, dan mencari data di internet. Baik sumber dari literatur-literatur buku, sumber dari artikel-artikel di Jurnal, artikel di Internet, serta dari majalah dan surat kabar yang membahas hal yang berkaitan dengan studi, kajian atau berita mengenai Angela Merkel dan kemenangannya sebagai Kanselir Jerman tahun 2005.

Setelah itu, data primer akan diperoleh dengan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam bertujuan untuk memahami bagaimana individu sebagai pemilih menentukan pilihannya pada Pemilu 2005 dan apa alasan yang mendasari pilihan mereka tersebut. Data berupa rekaman hasil wawancara dengan nara sumber.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah aktor secara individual. Individu mungkin adalah unit analisa paling umum dalam penelitian sosial karena penjelasan

akan individu dapat digunakan pula untuk menjelaskan kondisi kelompok dan interaksi sosial. Individu, sebagai unit analisis, dikarakterisasi oleh kelompok sosial dimana ia berada. Begitupun dengan para pemilih di Jerman. Hasil pemilu legislatif adalah hasil dari pilihan para individu di dalam masyarakat Jerman, mereka memiliki hak suara mereka masing-masing. Satu suara untuk satu individu. Maka, kumpulan alasan dari sejumlah individu, yang akan diperoleh melalui wawancara, dapat dikumpulkan untuk menjelaskan masyarakat Jerman sebagai satu kelompok warga yang memilih dalam Pemilu tahun 2005. setiap individu inilah yang berkontribusi dalam terpilihnya Angela Merkel sebagai Kanselir Jerman pada saat itu.

Terkait dengan pengambilan sampel, peneliti akan menggunakan Sampel Non-probabilitas, yaitu teknik memilih sampel dalam beberapa cara yang tidak dirujuk oleh teori probabilitas (teori kemungkinan). Peneliti menggunakan *purposive* (judgmental sample), yaitu satu tipe dari sampel non-probabilitas dimana peneliti akan memilih unit untuk diobservasi berdasarkan penilaian peneliti sendiri mengenai yang manakah yang paling berguna dan representatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Jerman yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2005. Oleh karena itu nara sumber dipilih berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- Warga Negara Republik Federal Jerman
- Memiliki hak pilih pada Pemilu di Jerman tahun 2005
- Sedang berada di Jakarta saat peneliti sedang melakukan penelitian

Melihat pentingnya sifat representatif dari sampel, untuk mencakup semua (hampir semua) anggota dari populasi, maka peneliti akan mengambil sampel dari beberapa sumber. *Pertama*, sampel yang diambil dari yayasan/perwakilan (*underbow*) dari Partai Politik Jerman yang berada di Indonesia maka peneliti mewawancarai Philipp Kaupert, seorang wakil direktur lokal dari Friedrich Ebert-Stiftung (wakil dari Partai Demokratik Sosial/SPD) di Jakarta.

*Kedua* adalah sampel yang diambil dari organisasi/lembaga masyarakat Jerman yang terdapat di Indonesia misalnya DAAD (*Deutscher Akademischer Austausch Dienst*), yang merupakan organisasi bersama dari institusi pendidikan

tinggi dan asosiasi mahasiswa Jerman. Di sini peneliti mewawancarai Guido Schnieder, dari kalangan pengajar, dan Aisha Maria Jarrar, dari kalangan pelajar.

Sedangkan sampel yang *ketiga* dapat diambil dari kalangan akademis seperti dari Program Studi Jerman yang berada di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Peneliti pun mewawancarai Gabriele Otto yang adalah seorang pengajar di Program Studi Jerman FIB UI.

Selain itu, peneliti juga bisa mengambil sampel dari kalangan masyarakat Jerman biasa, sebagai pemilih dalam Pemilu 2005 di Jerman, yang kebetulan sedang berada di Indonesia. Peneliti mendapatkan Bernd Nestler, yang kebetulan sedang bekerja di PT Clariant Indonesia, sebagai salah satu nara sumber yang bisa diwawancarai.

### 1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami kajian didalam skripsi ini, maka alur pembahasan akan disusun sebagai berikut.

Bab 1, "**Pendahuluan**", yang akan berisi latar permasalahan yang dapat memberikan pemahaman awal bagi pembaca dalam memahami masalah. selain itu terdapat rumusan masalah yang merupakan masalah pokok untuk kemudian dikaji pada bab selanjutnya. Terdapat pula teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada. Selain itu terdapat pula skema alur berpikir, asumsi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2, "**Masalah Identitas Marjinal Di Tengah Masyarakat Dan Di Dalam Pemerintahan Negara Republik Jerman**", yang akan berisi pemaparan mengenai tinjauan pustaka. Khususnya tinjauan pustaka mengenai teori-teori serta konsep-konsep yang dapat menjadi dasar berpikir dalam penelitian ini, yaitu yang berasal dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai masalah identitas sosial dalam masyarakat dan Pemilihan Umum di Jerman, sehingga dapat dilihat perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya yang sudah ada.

Bab 3, "**Pemilihan Umum Republik Federal Jerman Tahun 2005**", pada bab ini akan dipaparkan dengan rinci deskripsi kasus yang diangkat dalam skripsi ini.

Mencakup kajian tentang permasalahan identitas maupun faktor-faktor lain (baik internal maupun eksternal seperti Partai Politik dan perubahan perilaku pemilih) yang berpengaruh dalam proses dan hasil Pemilu legislatif 2005, dimana Angela Merkel terpilih menjadi Kanselir Jerman.

Bab 4, "**Faktor-Faktor Kemenangan Angela Merkel Pada Pemilu Jerman Tahun 2005**", yang akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasannya. Hasil penelitian yaitu berupa penyajian data-data yang telah diperoleh termasuk hasil wawancara yang telah dilakukan. Data-data tersebut memiliki relevansi dengan topik skripsi ini yaitu mengenai pengaruh dari permasalahan identitas yang ada serta faktor-faktor kemenangan yang ditemukan dalam proses menuju keberhasilan Angela Merkel terpilih sebagai Kanselir Jerman tahun 2005. Bagian pembahasan adalah pemaparan analisis dari data-data tersebut dan interpretasinya berkaitan dengan kerangka teori Patriarki, stratifikasi sosial, partai politik, dan tingkah laku pemilih dalam Pemilu yang digunakan dalam skripsi ini.

Bab 5, "**Kesimpulan**", berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan dan analisa yang telah dilakukan, serta keterkaitannya dengan kerangka teori dan konsep yang diajukan.

Dengan dibuatnya alur dan susunan seperti yang telah dijelaskan diatas, diharapkan penulis dapat memahami dan mengetahui kondisi dan permasalahan yang terjadi.